



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2024
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

1.	<i>RADAR BANTEN</i>	4.	<i>SATELIT NEWS</i>	JANUARI	MEI	SEPTEMBER	2024
2.	<i>BANTEN POS</i> ✓	5.	<i>BANTEN RAYA</i>	FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
3.	<i>KABAR BANTEN</i>	6.		MARET	JULI	NOVEMBER	
				17 APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	

BPK BERI CATATAN ATAS KINERJA KEUANGAN PEMPROV BANTEN

SERANG, BANPOS - Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Banten memberikan catatan atas kinerja keuangan Pemprov Banten tahun anggaran 2023. Catatan tersebut terkait masalah pendapatan, penggunaan dana BOS, realisasi belanja dan pengelolaan

BACA **KINERJA** HAL - 9



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2024 BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

1.	<i>RADAR BANTEN</i>	4.	<i>SATELIT NEWS</i>
2.	<i>BANTEN POS</i> ✓	5.	<i>BANTEN RAYA</i>
3.	<i>KABAR BANTEN</i>	6.	

JANUARI	MEI	SEPTEMBER	2024
FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
MARET	JULI	NOVEMBER	
17 APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	

Kinerja Keuangan...

Sambungan dari Halaman 1

aset tetap yang saat ini dianggap belum sepenuhnya memadai.

Hal itu diungkapkan anggota V BPK Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara, Alunadi Noor Supit. Ia menjelaskan, lembaganya menemukan permasalahan mengenai pengelolaan pajak air permukaan yang belum optimal.

Permasalahan tersebut berupa adanya perusahaan yang memanfaatkan air permukaan, namun belum memiliki Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA), dan belum memiliki NPWPD

"Sehingga pendapatan pajak air permukaannya belum diperoleh Pemerintah Provinsi Banten," paparnya pada saat rapat Paripurna DPRD Banten, Jumat (5/4).

Kemudian selain itu, pihaknya juga menemukan permasalahan

dalam penggunaan dana BOS pada lima satuan Pendidikan yang tidak sesuai ketentuan. Lalu realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang tak sesuai spesifikasi kontrak. "Ada juga jalan, irigasi, dan jaringan yang tidak seluruhnya sesuai spesifikasi kontrak," jelasnya

Tak hanya itu, ia juga memaparkan bahwa terkait pengelolaan aset pun, Pemprov Banten dirasa masih belum maksimal. "Terakhir soal pengelolaan aset tetap yang belum sepenuhnya memadai," ucapnya.

Atas permasalahan itu, pihaknya memberikan saran, agar Pemprov Banten untuk bisa segera menertibkan perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan air permukaan namun belum memiliki izin SIPPA, belum memasang meteran air dan belum mengurus NPWPD.

Kemudian soal dana BOS, ia juga memberikan saran untuk bisa

meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dananya serta memproses kelebihan pembayaran yang tidak sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke kas daerah.

"Memproses kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan yang belum dipungut atas pekerjaan pengadaan gedung dan bangunan serta jalan, irigasi, dan jembatan untuk selanjutnya menyetorkannya ke kas daerah," terangnya.

Untuk tertib administratif, ia meminta agar Pemprov Banten secepatnya memproses Berita Acara Serah Terima Aset tanah dan jalan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur.

"Menginventarisasi dan menelusuri barang-barang yang tidak diketahui keberadaannya, memproses berita acara pinjam pakai kendaraan sesuai dengan ketentuan, dan menyusun kebijakan

akuntansi mengenai penatausahaan Properti Investasi," ujarnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengaku bakal segera menindaklanjuti temuan dari BPK tersebut. Menurutnya, raihan WTP yang diterima Pemprov Banten dia akui akan dijadikan sebagai bahan introspeksi diri dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten atas segala koreksi dan rekomendasi dalam penyajian LKPD. Kami mohon bimbingan dan arahan untuk penyelesaian rekomendasi. Terutama perbaikan-perbaikan administrasi pengelolaan keuangan," ungkapnya. "Kami berkomitmen untuk melaksanakan koreksi dan rekomendasi," tegas Al Muktabar.(MFD/ENK)